

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu. Semakin besar angka yang dihasilkan pada PDRB menunjukkan semakin bagus ekonomi suatu daerah.

TABEL 4.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008-2018

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2008	1.329.115,91	-
2009	1.488.466,50	11,99%
2010	1.610.763,93	8,22%
2011	1.756.433,05	9,04%
2012	1.907.058,06	8,58%
2013	2.040.835,62	7,01%
2014	2.105.152,61	3,15%
2015	2.247.306,50	6,75%
2016	2.374.008,65	5,64%
2017	2.516.512,05	6,00%
2018	2.677.037,32	6,38%

Sumber : Data Olah

Pada Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 tingkat

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara sebesar 11,99% lalu turun pada tahun 2010 sebesar 8,22%. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi sebesar 8,58% lalu terus menurun pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2013 menjadi 7,01% dan 2014 menjadi 3,15%. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan lagi menjadi sebesar 6,75% lalu disusul penurunan pada tahun selanjutnya menjadi 5,64%. Pada tahun 2017, Kabupaten Konawe Utara mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,00% dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya sebesar 6,38%.

TABEL 4.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2014

No	Lapangan Usaha	2011 (Juta Rupiah)	2012 (Juta Rupiah)	2013 (Juta Rupiah)	2014 (Juta Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	751.389,18	778.409,35	817.141,26	882.474,82
B	Pertambangan dan Penggalian	389.739,66	471.475,81	519.682,28	432.600,27
C	Industri Pengolahan	22.581,36	24.044,42	25.092,50	26.913,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	45,95	53,96	59,38	65,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	760,89	823,08	903,35	955,05
F	Konstruksi	199.082,80	210.875,42	225.940,05	260.361,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	173.322,86	188.864,75	199.775,57	219.325,61

No	Lapangan Usaha	2011 (Juta Rupiah)	2012 (Juta Rupiah)	2013 (Juta Rupiah)	2014 (Juta Rupiah)
H	Transportasi dan Pergudangan	5.998,77	6.478,07	6.834,40	7.382,94
I	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2.956,94	3.257,91	3.505,22	3.710,61
J	Infomasi dan Komunikasi	5.352,66	5.975,88	6.658,45	6.806,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.200,34	18.034,07	24.862,71	27.886,02
L	Real Estat	27.070,61	28.892,32	29.829,03	31.796,11
M, N	Jasa Perusahaan	792,76	876,61	924,38	1.006,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	94.394,22	95.455,62	99.682,61	114.195,25
P	Jasa Pendidikan	44.561,29	47.503,01	51.176,51	57.467,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18.793,53	20.079,71	22.340,45	25.074,94
R,S, T,U	Jasa Lainnya	5.389,24	5.958,07	6.422,47	7.130,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1.756.433,05	1.907.058,06	2.040.835,62	2.105.152,61

Sumber : BPS (2016)

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tentang Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2011-2014 yang berdasarkan pada Sektor Lapangan Usaha. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diuraikan pada Tabel 4.1 yang terjadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014

disebabkan karena tingkat perubahan nilai sektor-sektor yang mengalami kenaikan tetapi tidak besar, bahkan jika dilihat pada Tabel 4.1 terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dari 7,01% pada tahun 2013 menjadi 3,15% pada tahun 2014. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat alasan mengapa terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat besar yang terjadi pada tahun 2014, jika dilihat dari sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2013 sebesar Rp.519.682.280.000,- mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.432.600.270.000,-. Ini berarti terjadi penurunan di sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,76%. Hal inilah yang menjelaskan mengapa terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat besar pada tahun 2014.

4.2 Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Pertumbuhan PDRB yang dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB pusat dan pendapatan perkapita daerah yang dibandingkan dengan pendapatan perkapita pusat adalah dua indikator utama yang digunakan dalam analisis tipologi kelas.

Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita	Laju Pertumbuhan Diatas Rata-Rata	Laju Pertumbuhan Dibawah Rata-Rata
Pendapatan Perkapita Diatas Rata-Rata	Daerah Maju	Daerah Maju Tapi Tertekan
Pendapatan Perkapita Dibawah Rata-Rata	Daerah Berkembang	Daerah Relatif Terbelakang

GAMBAR 4.1

Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen
Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Perkapita

Terdapat empat klasifikasi yang dibagi dalam analisis tipologi klassen yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income) dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income).

TABEL 4.3

Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008-2018

Tahun	PDRB Per Kapita Kab. Konawe Utara (Rupiah)	PDRB Per Kapita Prov. Sulawesi Tenggara (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe Utara (%)	Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sulawesi Tenggara (%)	Tipologi Klassen
2008	29.045.365	20.544.523	-	-	-
2009	31.917.368	21.226.475	11,99	7,57	Daerah Maju
2010	31.082.027	21.573.111	8,22	8,19	Daerah Maju

Tahun	PDRB Per Kapita Kab. Konawe Utara (Rupiah)	PDRB Per Kapita Prov. Sulawesi Tenggara (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe Utara (%)	Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sulawesi Tenggara (%)	Tipologi Klassen
2011	33.085.935	23.338.073	9,04	10,63	Daerah Maju Tapi Tertekan
2012	35.079.428	25.489.785	8,58	11,65	Daerah Maju Tapi Tertekan
2013	36.558.391	26.817.472	7,01	7,51	Daerah Maju Tapi Tertekan
2016	39.783.631	30.476.389	5,64	6,51	Daerah Maju Tapi Tertekan
2017	41.332.896	31.894.472	6,00	6,76	Daerah Maju Tapi Tertekan
2018	42.899.176	33.285.619	6,38	6,42	Daerah Maju Tapi Tertekan

Sumber : Data Olah

Pada hasil analisis tabel diatas, Kabupaten Konawe Utara pada tahun awal pemekaran terindifikasi sebagai Daerah Maju karena PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhannya lebih besar daripada PDRB Prov. Sulawesi Tenggara. Sedangkan mulai tahun 2011 sampai 2018, Kabupaten Konawe Utara terindifikasi sebagai Daerah Maju tapi Tertekan karena PDRB Per Kapita Kab. Konawe Utara lebih besar daripada PDRB Per Kapita Prov. Sulawesi Tenggara, namun tingkat pertumbuhan Kabupaten Konawe Utara lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Prov. Sulawesi Tenggara. Daerah Maju tapi Tertekan adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju

pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi di masa datang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

4.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, Pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Interpretasi nilai IPM semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, dalam arti semakin mendekati nilai 100, maka semakin bagus tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut sesuai dengan kriteria nilai suatu daerah.

TABEL 4.4
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008-2018

Tahun	IPM
2008	67,43
2009	67,97
2010	68,38
2011	69,24
2012	64,87
2013	65,54
2014	66,03

Tahun	IPM
2015	66,44
2016	67,20
2017	67,71
2018	68,50

Sumber : BPS (2019)

Pada tabel diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008 sampai 2018. Angka IPM Kabupaten Konawe Utara berada di interval IPM Sedang. Artinya penduduk Kabupaten Konawe Utara dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya dengan cukup baik. Angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Utara selalu berada diatas angka indeks 60. IPM tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 69,24 dan IPM terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 66,03.

4.4 Kinerja Kemampuan Fiskal

4.4.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

TABEL 4.5
 Penghitungan Rasio DDF Kabupaten Konawe Utara
 Tahun Anggaran 2008-2018

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Juta Rp.)	Total Pendapatan Daerah (Juta Rp.)	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Keterangan
2008	25.553	217.609	11,47%	Rendah
2009	17.722	396.344	4,47%	Sangat Rendah
2010	14.698	438.189	3,35%	Sangat Rendah
2011	88.043	545.755	16,13%	Rendah
2012	88.043	545.755	16,13%	Rendah
2013	23.119	581.828	3,97%	Sangat Rendah
2014	10.539	591.597	1,78%	Sangat Rendah
2015	8.993	677.955	1,33%	Sangat Rendah
2016	10.048	783.005	1,28%	Sangat Rendah
2017	21.690	742.535	2,92%	Sangat Rendah
2018	15.614	778.087	2,01%	Sangat Rendah

Sumber : Data Olah

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Konawe Utara jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Rendah. Terlihat sepanjang 10 Tahun berjalan hanya 3 tahun berada diangka persentase lebih dari 10%. Dimulai dari Tahun 2008 sebesar 11.47% terus mengalami penurunan pada tahun selanjutnya yaitu pada 2009 sebesar 4.47% dan tahun 2010 sebesar 3.35%, sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan menjadi 16.13%. Setelah itu terus terjadi penurunan pada tahun 2013 sampai 2016. Namun pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 2.92% dan menurun lagi pada tahun 2018 sebesar 2.01%.

Berdasarkan hasil diatas, setelah sempat berada diatas 10% pada tahun 2011 dan 2012, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kemampuan kinerja keuangan Kabupaten Konawe Utara jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih Sangat Rendah, karena berada pada skala Interval 0,00%-10,00%.

4.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

TABEL 4.6
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun Anggaran 2008-2018

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Jutaan Rp)	Dana Perimbangan (Jutaan Rp)	RKKD (%)	Keterangan Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
2008	25.553	176.664	14,46%	Sangat Rendah	Instruktif
2009	17.722	349.054	5,08%	Sangat Rendah	Instruktif
2010	14.698	389.035	3,78%	Sangat Rendah	Instruktif
2011	88.043	369.135	23,85%	Sangat Rendah	Instruktif

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Jutaan Rp)	Dana Perimbangan (Jutaan Rp)	RKKD (%)	Keterangan Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
2012	88.043	369.135	23,85%	Sangat Rendah	Instruktif
2013	23.119	525.239	4,40%	Sangat Rendah	Instruktif
2014	10.539	549.239	1,92%	Sangat Rendah	Instruktif
2015	8.993	596.359	1,51%	Sangat Rendah	Instruktif
2016	10.048	674.238	1,49%	Sangat Rendah	Instruktif
2017	21.690	587.140	3,69%	Sangat Rendah	Instruktif
2018	15.614	749.176	2,08%	Sangat Rendah	Instruktif

Sumber : Data Olah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas kemampuan keuangan Kabupaten Konawe Utara jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Nilai terendah terjadi pada tahun 2016 dimana nilainya sebesar 1,46% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 23,85%. Pada tahun awal yaitu tahun 2008 sebesar 14,46% sedangkan selebihnya masih dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

4.4.3 Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian Belanja Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL 4.7
Penghitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun Anggaran 2008-2018 (Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja (Jutaan Rupiah)	Realisasi Belanja Modal (Jutaan Rupiah)	Rasio Belanja Operasi (%)	Keterangan
2008	252.484	77.332	30,63	Rendah
2009	399.958	153.619	38,41	Rendah
2010	440.245	189.539	43,05	Sedang
2011	517.601	224.172	43,31	Sedang
2012	517.601	224.172	43,31	Sedang
2013	539.656	200.742	37,20	Rendah
2014	599.935	215.901	35,99	Rendah
2015	690.419	264.843	38,36	Rendah
2016	750.434	225.164	30,00	Rendah
2017	737.952	164.326	22,27	Rendah
2018	613.024	146.887	23,96	Rendah

Sumber : Data Olah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan untuk alokasi penggunaan dana pada Belanja Modal masih dibawah 50%. Nilai tertinggi terdapat pada tahun 2010-2012 yaitu diatas 40% dalam kategori Sedang. Selebihnya pada tahun 2008-2009, dan tahun 2013 -2018 nilainya masih rendah.

4.4.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk meperoleh pendaptan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.8
Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2008-2018

Tahun Anggaran	Realsisasi Belanja (Jutaan Rp)	Realisasi Pendapatan (Jutaan Rp)	REKD (%)	Keterangan
2008	252.484	217.609	116,03	Tidak Efisien
2009	399.958	396.344	100,91	Tidak Efisien
2010	440.245	438.189	100,47	Tidak Efisien
2011	517.601	545.755	94,84	Kurang Efisien
2012	517.601	545.755	94,84	Kurang Efisien
2013	539.656	581.828	92,75	Kurang Efisien

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Jutaan Rp)	Realisasi Pendapatan (Jutaan Rp)	REKD (%)	Keterangan
2014	599.935	591.597	101,41	Tidak Efisien
2015	690.419	677.955	101,84	Tidak Efisien
2016	750.434	783.005	95,84	Kurang Efisien
2017	737.952	742.535	99,38	Kurang Efisien
2018	613.024	778.087	78,79	Efisien

Sumber : Data Olah

Berdasarkan penghitungan pada tabel diatas Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Kurang Efisien. Hal ini didasarkan pada data yang menunjukkan selama 10 tahun berjalan. Pada tahun 2018 terakhir Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara berada pada angka 78,79% dalam artian efisien yaitu Realisasi pendapatan lebih besar daripada Relalisasi Belanja. Dimulai pada tahun 2008 sampe 2017 angka rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara selalu mencapai angka diatas 90% yang artinya Kurang Efisien, bahkan pada tahun 2008-2010, dan 2014-2015 menjadi tidak efisien karena melebihi angka 100% yang berarti Realisasi Belanja Lebih Besar daripada Realisasi Pendapatan yang terjadi.

4.5 Analisis Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten Konawe Utara

TABEL 4.9

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2008-2018

No	Tahun	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	Analisis Tipologi Klassen	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		Rasio Keserasian Belanja Daerah		Rasio Efisiensi Keuangan Daerah		Kesimpulan
				Angka	Ket	Angka	Ket	Angka	Ket	Angka	Ket	
1	2008	-	-	11,47%	Rendah	14.46%	Sangat Rendah	30.63%	Rendah	116,03%	Tidak Efisien	Sangat Rendah
2	2009	11,99%	Daerah Maju	4,47%	Sangat Rendah	5.08%	Sangat Rendah	38.41%	Rendah	100,91%	Tidak Efisien	Sangat Rendah
3	2010	8,22%	Daerah Maju	3,35%	Sangat Rendah	3.78%	Sangat Rendah	43.05%	Sedang	100,47%	Tidak Efisien	Sangat Rendah
4	2011	9,04%	Daerah Maju Tapi Tertekan	16,13%	Rendah	23.85%	Sangat Rendah	43.31%	Sedang	94.84%	Kurang Efisien	Sangat Rendah
5	2012	8,58%	Daerah Maju Tapi Tertekan	16,13%	Rendah	23.85%	Sangat Rendah	43.31%	Sedang	94.84%	Kurang Efisien	Sangat Rendah
6	2013	7,01%	Daerah Maju Tapi Tertekan	3,97%	Sangat Rendah	4.40%	Sangat Rendah	37.20%	Rendah	92.75%	Kurang Efisien	Sangat Rendah
7	2014	3,15%	Daerah Maju Tapi Tertekan	1,78%	Sangat Rendah	1.92%	Sangat Rendah	35.99%	Rendah	101.41%	Tidak Efisien	Sangat Rendah
8	2015	6,75%	Daerah Maju Tapi Tertekan	1,33%	Sangat Rendah	1.51%	Sangat Rendah	38.36%	Rendah	101.84%	Tidak Efisien	Sangat Rendah
9	2016	5,64%	Daerah Maju Tapi Tertekan	1,28%	Sangat Rendah	1.49%	Sangat Rendah	30.00%	Rendah	95.84%	Kurang Efisien	Sangat Rendah
10	2017	6,00%	Daerah Maju Tapi Tertekan	2,92%	Sangat Rendah	3.69%	Sangat Rendah	22.27%	Rendah	99.38%	Kurang Efisien	Sangat Rendah
11	2018	6,38%	Daerah Maju Tapi Tertekan	2,01%	Sangat Rendah	2.08%	Sangat Rendah	23.96%	Rendah	78.79%	Efisien	Sangat Rendah
12	Rata- Rata	7,28%	Daerah Maju Tapi Tertekan	5,92%	Sangat Rendah	7,83%	Sangat Rendah	35,14%	Rendah	97,92%	Kurang Efisien	Sangat Rendah

Sumber : Data Olah

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi dampak pemekaran daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 dari beberapa indikator yang diteliti dapat disimpulkan bahwa pada tiap tahunnya pertumbuhan ekonomi dan kinerja pemerintah daerah masih *Sangat Rendah*.

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 mengalami fluktuasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Konawe Utara terjadi pada tahun awal pemekaran yaitu 2009 sebesar 11,99%. Tingkat pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Konawe Utara terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,15%. Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 yaitu 7,28%. Hasil analisis Tipologi Klassen yang didasarkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 juga menunjukkan pada Kabupaten Konawe Utara selalu berada pada keadaan “Daerah Maju Tapi Tertekan”. Sedangkan hanya pada tahun awal pemekaran Kabupaten Konawe Utara berada pada keadaan “Daerah Maju”. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Utara secara rata-rata pada tahun 2008-2018 sebesar 67,21.

Berdasarkan hasil analisis kemampuan fiskal di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 menunjukkan bahwa kemampuan fiskal di Kabupaten Konawe Utara masih *Sangat Rendah*, hal ini didasarkan pada rata-rata dari empat indikator kinerja keuangan yaitu:

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan masih Sangat Rendah, Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan pemerintah Kabupaten Konawe Utara secara rata-rata berada pada angka 5,92%, yang artinya Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 5,92% saja dari Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Konawe Utara. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tertinggi berada pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 16,13% dan terendah berada pada tahun 2016 sebesar 1,28%.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih *Sangat Rendah*. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008-2018 secara rata-rata sebesar 7,83%, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi berada pada tahun 2011-2012 sebesar 23,85% dan terendah berada pada tahun 2016 sebesar 1,49%. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi, jika rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan daerah berada pada angka dibawah 10% artinya sebesar 90% keuangan daerah tersebut bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Rasio Keserasian Belanja Daerah menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal masih *Rendah*. Rasio Keserasian Belanja Daerah di Kabupaten Konawe Utara pada tahun

2008-2018 secara rata-rata sebesar 35,14%, Rasio Keserasian Belanja Daerah tertinggi berada pada tahun 2011-2012 sebesar 43,31% dan terendah berada pada tahun 2017 sebesar 22,27%. Keserasian belanja modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kemampuan daerah untuk menyediakan belanja pembangunan relatif rendah dan belum mampu melakukan investasi jangka panjang yang secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah yang menunjukkan perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan daerah masih *Kurang Efisien*. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begi pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Utara secara rata-rata sebesar 97,92%. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tertinggi terjadi pada tahun awal pemekaran yaitu tahun 2008 sebesar 116,03% yang menunjukkan bahwa total pengeluaran daerah lebih besar daripada total pendapatan daerah menjadikannya tidak efisien. Sedangkan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 78,79% yang menunjukkan bahwa pada tahun ini Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berapa pada tingkat yang Efisien, karena berada pada interval 60%-80%.